



Pemerintah
Kabupaten
Tasikmalaya



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMLAYA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan. Dokumen ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja, serta analisis atas tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Selain itu, diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan meridai setiap langkah

pengabdian kita dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2025 menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan, yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah, dengan sasaran: Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah dengan indikator sasaran Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan.
2. Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dengan sasaran: Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat dengan indikator sasaran Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat.
3. Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip, dengan sasaran: Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku dengan indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dengan sasaran: Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan indikator sasaran Persentase perizinan yang terfasilitasi.
5. Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, Pengoordinasian administratif dan pelayanan administrasi perangkat daerah, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator sasaran (a) Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti; (b) Level Kematangan/Maturitas PBJ.
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
 - Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

dengan indikator sasaran (a) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti; (b) Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan (c) Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah.

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 dilakukan dengan pengukuran kinerja masing-masing sasaran melalui pelaksanaan 6 program, 21 kegiatan dan 61 Subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 85.997.502.983 (Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI	2
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.3 ASPEK KEPEGAWAIAN	6
1.4 ISU AKTUAL	8
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	9
BAB II RENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN	
KINERJA.....	1
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	2
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	3
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT	
DAERAH.....	5
2.2 RENCANA KERJA	7
2.3 PENETAPAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	1
3.1.1 .CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	5
3.1.2 .EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS...	9

3.1.3. ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI.....	49
3.2 REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV PENUTUP	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : TABEL 6.1 RENCANA STRATEGIS SETDA KAB. TASIKMALAYA	
LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
LAMPIRAN III : RENCANA AKSI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	FASILITAS KERJA DI LINGKUNGAN SETDA	7
Tabel 2.1	TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021-2026	5
Tabel 2.2	RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024.....	7
Tabel 2.3	RENCANA KERJA PERUBAHAN SERETARIAT DAERAH TAHUN 2024.....	9
Tabel 2.4	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	12
Tabel 2.5	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	14
Tabel 3.1	SKALA PENILIAN	3
Tabel 3.2	REKAPITULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	4
Tabel 3.3	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. TASIKMLAYA TAHUN 2023-2024	6
Tabel 3.4	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023-2024 DENGAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021- 2026.....	30

Tabel 3.5	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN REALISASI KINERJA PUSAT/NASIONAL TAHUN 2024.	31
Tabel 3.6	ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024	34
Tabel 3.7	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	37
Tabel 3.8	ANGGARAN DAN REALISASI ABPD SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024.....	52
Tabel 4.1	PERJANJIAN KINERJA, REALISASI DAN RATA- RATA CAPAIAN KINERJA.....	1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	5
Gambar 1.2	SUMBER DAYA MANUSIA	6
Gambar 3.1	KINERJA JUMLAH MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN YANG TERSELESAIKAN	9
Gambar 3.2	KINERJA NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	11
Gambar 3.3	KINERJA PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU	14
Gambar 3.4	KINERJA NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH	17
Gambar 3.5	KINERJA PERSENTASE BAHAN KEBIJAKAN UMUM LINGKUP PEMERINTAHAN YANG DITINDAKLANJUTI	33
Gambar 3.6	KINERJA PERSENTASE PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH	36

Gambar 3.7 KINERJA PERSENTASE REGULASI PERATURAN
PUSAT YANG DITINDAKLANJUTI MENJADI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH. 40

Gambar 3.8 KINERJA PERSENTASE BAHAN KEBIJAKAN
UMUM LINGKUP PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI..... 43

Gambar 3.9 KINERJA PERSENTASE BAHAN KEBIJAKAN
UMUM LINGKUP PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam perumusan kebijakan serta pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, termasuk penyelenggaraan pelayanan administratif. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dala konteks penyelenggaraan administrasi publik, isu strategis yang terus mengemuka adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan Misi ke-2 dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional. Konsekuensinya, Sekretariat Daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur guna menjamin kelancaran, sinkronisasi, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan landasan tersebut, penyusunan LKIP memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan. Kedua, sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. Aspek akuntabilitas eksternal, yaitu menjadikan LKIP Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Substansi capaian yang dilaporkan mengacu pada tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. Aspek manajemen internal, yaitu menjadikan LKIP sebagai instrumen evaluasi manajemen kinerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Setiap permasalahan yang ditemukan akan dianalisis secara komprehensif guna merumuskan langkah-langkah perbaikan, sehingga peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- e. perumusan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. Struktur Organisasi

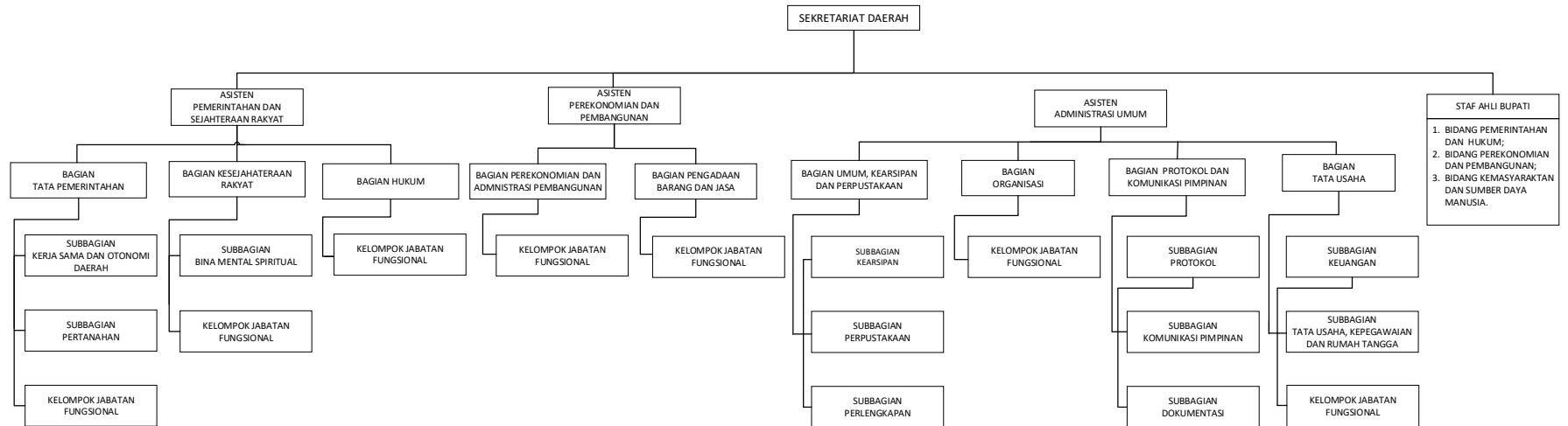
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Pertanahan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Hukum, terdiri atas:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:
 - a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b) Subbagian Kearsipan; dan
 - c) Subbagian Perpustakaan;
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi;
 - 4. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Staf Ahli Bupati.

Berikut ini mengenai bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam gambar, sebagai berikut :

Gambar.1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



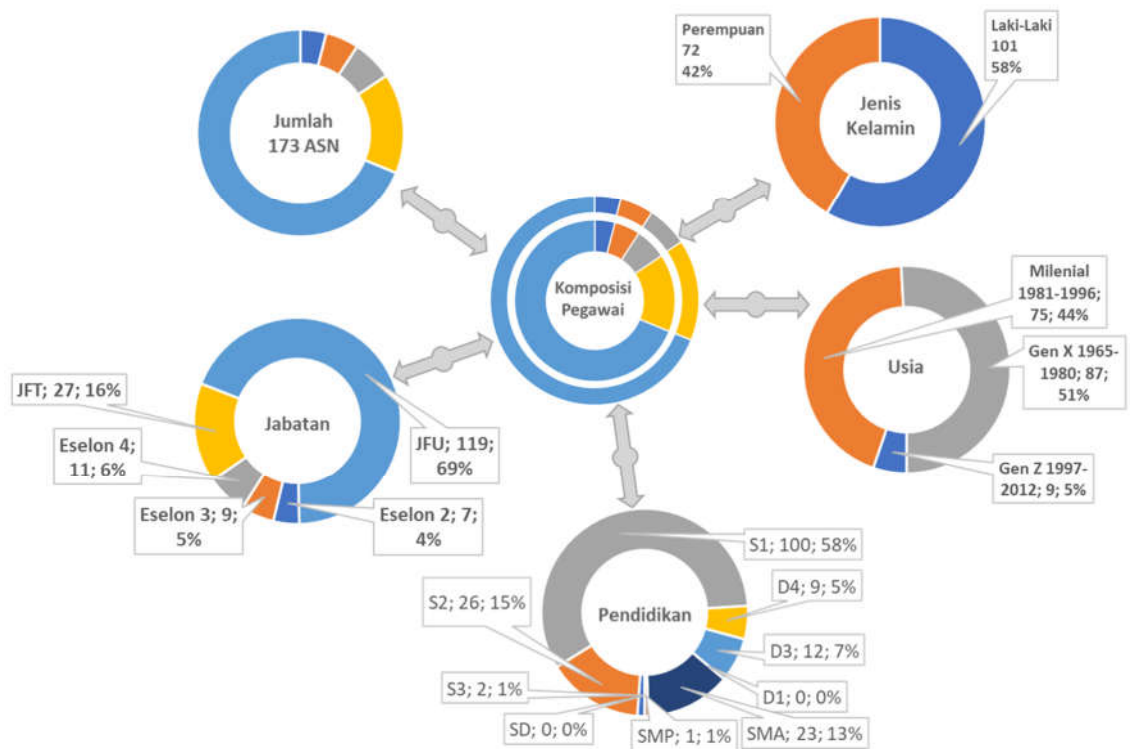
Sumber:Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 119 tahun 2021

1.3. Aspek Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 orang Asisten, 3 orang Staf Ahli Bupati, 9 orang Kepala Bagian, 11 orang Kepala Sub Bagian, 16 Pejabat Fungsional dan 138 Pelaksana. Perkembangan pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar.1.2

SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber : DUK Setda

Keterangan: Kondisi per Desember 2025

Peran pendidikan formal disadari dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. Sehubungan dengan

hal tersebut dukungan Pemerintah Daerah terhadap pegawai yang melanjutkan pendidikan formal perlu terus ditingkatkan. Kemudahan memperoleh izin belajar memperbesar peluang pegawai untuk meningkatkan tingkat pendidikan formal. Namun demikian kita tidak dapat menutup kenyataan bahwa masih ada pegawai yang tingkat pendidikannya kurang sesuai dengan jabatan yang didudukinya sehingga perlu didukung oleh keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) yang secara teknis dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya.

Fasilitas kerja sebagai penunjang penyelenggaraan proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun data fasilitas kerja yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Fasilitas Kerja di Lingkungan Setda

No	UNIT KERJA	Bangunan/ ruangan kerja (dalam meter)	Komputer		Mobil	Motor
			Laptop	PC		
1	Sekretaris Daerah	(7,2 x 3,6 m)x 2 ruangan	7	1	4	5
2	Asisten	(7,2 x ,6 m)x 3 ruangan	2	3	3	
3	Staf Ahli Bupati	(7,2 x 3,6 m) x 1 ruangan	-	2	2	1
4	Bagian Pemerintahan	7,2 x 9m x 2 ruangan	23	7	6	15
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(3 x 7m)x 1 ruangan (12 x 7m)x 1 ruangan	6	9	1	16
6	Bagian Perekonomian & Administrasi Pembangunan	(7,2 x 9 m) x 2 ruangan	1	11	1	8
7	Bagian Pengadaan Barang Jasa	(7,2 x 9 m) x 2 ruangan	22	5	1	4

No	UNIT KERJA	Bangunan/ ruangan kerja (dalam meter)	Komputer		Mobil	Motor
			Laptop	PC		
8	Bagian Organisasi	(7,2 x 9 m) x 2 ruangan	8	5	1	5
9	Bagian Umum	(7,2 x 3,6 m)x 1 ruangan (7,2 x 9 m) x 4 ruangan	17	16	27	50
10	Bagian Hukum	(9,6 x 7,2)x 1 ruangan	11	3	1	3
11	Bagian Tata Usaha	(7,2 x 9 m) x 3 ruangan	19	9	1	3
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(7,2 x 9 m) x 3 ruangan	13	10	3	16
	Jumlah		146	81	51	126

Keterangan: Dari total keseluruhan fasilitas kerja terdapat 32 laptop dan 27 PC dalam kondisi rusak.

Sumber : Bagian Umum

Dari data tersebut prasarana dan sarana yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dipandang sudah memadai, namun masih perlu pemerataan dalam pendistribusiannya, maka secara bertahap Sekretariat Daerah merencanakan pemenuhan dan pengadaan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas jabatan.

1.4. Isu Aktual

Adapun Isu Aktual Sekretariat Daerah adalah :

1. Peningkatan budaya gemar membaca;
2. Peningkatan Arsip Dinamis;
3. Partisipasi dalam Gender Focal Point;
4. Penempatan Pegawai yang belum proporsional;
5. Masih lemahnya koordinasi di lingkungan Sekretariat Daerah;

6. Belum optimalnya analisis kebijakan yang dikeluarkan;
7. Lemahnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi;
8. Aspek ketatalaksanaan belum optimal;

1.5. Sistematika Penyajian

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kepegawaian, Isu Aktual dan Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran : Tabel 6.1 Renstra
 Perjanjian Kinerja
 Rencana Aksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah menegaskan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan secara komprehensif potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun yang berpotensi timbul. Proses perencanaan strategis tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan pendanaan, serta target capaian kinerja yang terukur.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berdampak pada penyesuaian tugas dan penambahan beberapa urusan pada Sekretariat Daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan optimalisasi fungsi koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun urusan yang menjadi lingkup tugas Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Renstra disusun sebagai instrumen perencanaan yang sistematis dan terarah guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 merupakan wujud komitmen organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesinambungan pembangunan, serta mengacu pada capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya, sehingga terdapat kesinambungan arah kebijakan dan peningkatan kualitas perencanaan.

Visi, misi, dan tujuan yang termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026 menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Dokumen Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Renja memuat prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan pagu indikatif dan kebutuhan pendanaan yang tersedia. Dengan demikian, Renja berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan tahunan dalam

rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara efektif dan terukur.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan lima tahun. Visi tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan daerah yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan (desired future) pada akhir periode perencanaan.

Perumusan visi pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek strategis, antara lain potensi daerah, kondisi eksisting, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan pendekatan tersebut, visi pembangunan periode 2021-2026 dirancang sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 beserta penjabaran maknanya adalah sebagai berikut:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran strategis sebagai yang membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.

Secara substansial, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan langsung dengan Misi Kedua pembangunan daerah, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional. Keterkaitan tersebut tercermin dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi kebijakan, serta pembinaan administrasi pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugas Sekretariat Daerah dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai
2	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi
3	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
4	Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif dan pelayanan administrasi perangkat daerah	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%
			Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%
			Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%
			Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%
5	Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang	%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
	Perlindungan Arsip		melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi selama satu tahun anggaran.

Tabel 2.2
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	1
2	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,95
3	Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	20,33 (12/59)
4	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase perizinan yang terfasilitasi	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	
5	Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif dan pelayanan administrasi administrasi perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	B	
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	
		Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	
			Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	
			Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100
			Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	9

Adapun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	2
2	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72,20
3	Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	50,85 (30/59)
5	Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif dan pelayanan administrasi perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	A (86)
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100
			Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100
			Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100
			Level Kematangan/Maturitas PBJ	Level	9

Pada Rencana Kerja Perubahan Sekretarai Daerah Tahun 2025 terdapat perubahan capaian target pada beberapa indikator sasaran, yaitu pada indikator sasaran : (1) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan, yang semula target 1 lokasi menjadi 2 lokasi, hal ini disebabkan karena adanya penambahan pemenuhan kebutuhan penyediaan tanah untuk pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya; (2) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku, yang semula target 16,94 (10/59) menjadi 50,85 (30/59), hal ini dikarenakan target awal telah tercapai di Tahun 2024; (3) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, yang semula B menjadi A (86), hal ini dikarenakan target awal telah tercapai di Tahun 2024; (4) Terdapat pula perubahan target pada indikator sasaran Persentase Perizinan yang Terfasilitasi dimana indikator tersebut tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya (1) belum adanya peraturan perundang-undangan daerah yang secara khusus mengatur pemanfaatan langsung panas bumi sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, (2) peraturan perundang-undangan daerah yang

secara khusus mengatur pemanfaatan langsung panas bumi sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, (3) Dalam proses penerbitan Sertifikat Standar Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi, salah satu persyaratan administratif yang diperlukan adalah sertifikat pelatihan terkait pemanfaatan panas bumi bagi Pelaku Usaha. Namun, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, belum ada ketentuan yang mengatur lembaga/instansi yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut dan pada saat ini sedang disusun kurikulum pelatihan dimaksud.

2.3 Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025 yang merupakan rencana tahunan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan berikut penetapan indikator serta target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2025.

Dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, Penetapan IKU Sekretariat Daerah, LKIP Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan terkait lainnya, penyajian Bab II Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mencakup indikator kinerja. Adapun uraian indikator Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Program
1	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	1 Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
2	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	1 Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,95	Program Pembinaan Perpustakaan
3	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	1 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	20,33 (12/59)	Program Pengelolaan Arsip
4	Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	1 Persentase perizinan yang terfasilitasi	%	100	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1 Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2 Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2025	Program
		3	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7		1	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	Program Perekonomian dan Pembangunan
		2	Level Kematangan / Maturitas PBJ	Level	9	Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 2.217.240.000	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 250.000.000	
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 80.000.000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 65.575.682.339	
5	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 55.031.660.622	
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 2.668.636.800	
	JUMLAH	Rp. 125.823.219.761	

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2025	Program
1	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
2	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	1	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72,20	Program Pembinaan Perpustakaan
3	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	50,85 (30/59)	Program Pengelolaan Arsip
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	A (86)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		2	Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		3	Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan	%	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target 2025	Program
			perundang-undangan daerah			
7	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	Program Perekonomian dan Pembangunan
		2	Level Kematangan / Maturitas PBJ	Level	9	Program Perekonomian dan Pembangunan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 1.946.734.900	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 230.589.500	
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 59.802.700	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 61.548.019.672	
5	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 20.539.303.361	
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 1.673.052.850	
	JUMLAH	Rp. 85.997.502.983	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disetujui oleh Bupati Tasikmalaya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. IKU berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Melalui proses evaluasi dan analisis terhadap capaian tersebut, dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, termasuk identifikasi faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan dan langkah-langkah peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Pengukuran kinerja dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan melalui pengolahan data kinerja yang diperoleh dari sistem pengumpulan data yang terstruktur. Data tersebut bersumber dari dua kategori, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal diperoleh dari sistem informasi dan laporan yang tersedia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, baik dalam bentuk laporan berkala (mingguan, bulanan, triwulanan) maupun laporan kegiatan yang bersifat insidental. Sementara itu, data eksternal diperoleh dari perangkat daerah terkait serta masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja yang komprehensif.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang akan dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja yang digunakan, serta target capaian yang direncanakan. Pengukuran terhadap capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK), yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Penetapan Kinerja. Proses ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap tingkat realisasi kinerja dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran.

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur. Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke taraf kegiatan, Tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan mengukur capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian asaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\%PRTC = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\%PRTC = \frac{Rencana - (Realisasi - Rrencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Keterangan :

PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Skala Penilaian :

Tabel 3.1. Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	> 80	Sangat Baik	

No	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
2	60 - 79,9	Baik	
3	50 - 59,9	Sedang	
4	0 - 49,9	Kurang	
5	0	Tidak Lengkap	

Sumber: Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Rumusan/Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan/Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Perhitungan
1	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Lokasi	Berdasarkan Jumlah Lokasi Pembebasan/Ganti Kerugian/Santunan Tanah pada Tahun n
2	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun n (Berdasarkan Hasil Penilaian Perpustakaan Nasional)
3	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Baku}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah}}$
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun n
	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Bahan	%	$= \frac{\text{Jumlah Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan}}$

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rumus Perhitungan
	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti		
		Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	$= \frac{\text{Jumlah Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan}}$
		Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	$= \frac{\text{Jumlah Regulasi Peraturan Pusat yang Ditanlanjuti Menjadi Peraturan Perundang – undangan Daerah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Regulasi Peraturan Pusat}}$
	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	$= \frac{\text{Jumlah Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan}}$
		Level Kematangan/ Maturitas PBJ	Level	Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan PBJ Tahun n

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang mendukung pencapaian misi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
1	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk pembangunan daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Terselesaikan	Lokasi	2	2	100%
2	Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	72,20	N/A	0%
3	Meningkatnya Ketersediaan, Penyelamatan dan Perlindungan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	50,85 (30/59)	50,85 (30/59)	100%
4	Mengoptimalkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif dan pelayanan administrasi perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai	A (86)	BB (78,44)	91,21%
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%
			Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	%	100	100	100%
			Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	%	100	100	100%
		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup	%	100	100	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian
		Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti				
			Level Kematangan/ Maturitas PBJ	Level	9	9	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan, Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku, Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti, Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah, Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti, Persentase Regulasi Peraturan Pusat yang Ditindaklanjuti Menjadi Peraturan Perundang-Undangan Daerah, dan Level Kematangan/Maturitas PBJ dengan capaian kinerja 100 %.
2. Capaian kinerja yang tidak memenuhi target atau mencapai kurang dari 100%, yaitu pada:
 - a. Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat hal ini disebabkan karena Perpustakaan Nasional tidak dapat melakukan penilaian terhadap urusan perpustakaan yang tidak berbentuk Dinas/Badan;
 - b. Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dan indikator . Target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Tahun Anggaran 2025 belum dapat tercapai secara optimal. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis dan teknis yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.

Pertama, belum optimalnya pemenuhan eviden dukung pada beberapa instrument indikator RB Parsial, khususnya pada sub instrument Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Evaluasi Pelayanan Publik, Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Tingkat Kematangan SPBE Sebagian indikator penilaian belum didukung dengan dokumentasi yang lengkap, sistematis, dan sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kedua, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara berkala dan terstruktur sesuai siklus manajemen kinerja, sehingga beberapa area perbaikan tidak teridentifikasi lebih awal.

Meskipun demikian, hasil evaluasi ini menjadi bahan pembelajaran yang penting bagi Sekretariat Daerah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem dokumentasi dan pelaporan, serta optimalisasi pengendalian internal. Dengan upaya tersebut, diharapkan nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada periode mendatang dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

3.1.2 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja, sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terpenuhinya Fasilitas Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.1
Kinerja Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang Terselesaikan

Realisasi pencapaian kinerja dengan indikator Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

yang terselesaikan. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebanyak 2 Lokasi, dan seluruhnya dapat diselesaikan sehingga realisasi mencapai 2 Lokasi atau 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa fasilitasi penyelesaian permasalahan pembebasan tanah telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Dari sisi anggaran, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.946.734.900, dengan realisasi sebesar Rp.1.668.796.146 atau 85,72% dari pagu yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 14,28%, tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 masing-masing sebanyak 4 kasus dengan capaian 100%, sehingga secara umum kinerja pada indikator ini menunjukkan konsistensi capaian yang optimal dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 200%.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan : Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.946.734.900	1.668.796.146	85,72
Keluaran	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100,00

Sasaran 2:

Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat memperlihatkan capaian kinerja sebesar N/A.



Gambar 3.2
Kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Realisasi pencapaian kinerja dengan indikator Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan. Pada Tahun 2025 ditetapkan target nilai sebesar 72,20, namun realisasi capaian pada tahun tersebut belum tersedia (N/A), hal tersebut dikarenakan Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki Dinas Perpustakaan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan, sehingga tidak termasuk dalam objek pengukuran dan penilaian TKM Tahun 2025.

Dari sisi dukungan anggaran, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.230.589.500, dengan realisasi sebesar Rp.226.982.000 atau 98,44% dari pagu anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan minat baca masyarakat telah dilaksanakan secara optimal dari sisi penyerapan anggaran.

Berdasarkan data capaian tahun sebelumnya, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2023 nilai yang diperoleh sebesar 55,9, kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi 72,15 atau mengalami peningkatan sebesar 16,26 poin. Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 86,40 dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi sebesar 111,26%, dengan peningkatan capaian dari Tahun 2023 ke 2024 sebesar 24,86 terhadap target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra, karena tidak dilaksanakan penilaian. Begitupun perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional bahwa nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di tingkat provinsi tercatat sebesar 59,19 dan nasional sebesar 54,8 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Kabupaten Tasikmalaya.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	230.589.500	226.982.000	98,44
Keluaran	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	13 Lokus	13 Lokus	100,00

Sasaran 3:

Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Baku memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.3
Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian indikator tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 50,85% atau 30 dari 59 perangkat daerah, sehingga capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Target tahun 2025 yang ditetapkan juga sebesar 50,85% (30/59), sehingga realisasi telah mencapai target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, terjadi tren peningkatan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2023 realisasi indikator tercatat sebesar 20,33% (12 dari 59 perangkat daerah), kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 32,20% (19 dari 59 perangkat daerah), dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 50,85% (30 dari 59 perangkat daerah). Dengan demikian terdapat peningkatan realisasi sebesar 11,87% pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan

meningkat pula sebesar 18,65% pada Tahun 2025 apabila dibandingkan Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam mendorong perangkat daerah untuk menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2023 tercatat sebesar 150,04%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 158,39%. Sedangkan di Tahun 2025 mengalami penurunan capaian kinerja, tetapi target kinerja tetap tercapai bahan di Tahun 2025 Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku meningkat dari semula di Tahun 2024 sebanyak 19 Perangkat Daerah menjadi 30 Perangkat Daerah di Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, yaitu sebesar 20,33% (12 dari 59 perangkat daerah), capaian pada tahun 2025 sebesar 50,85% (30 dari 59 perangkat daerah) telah melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 250,12%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengelolaan arsip telah berjalan secara efektif dalam mendorong peningkatan penerapan pengelolaan arsip secara baku di lingkungan perangkat daerah.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp59.802.700, dengan realisasi anggaran sebesar Rp58.754.141 atau 98,25% dari total pagu yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 1,75%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan perbandingan dengan realisasi pada tingkat provinsi dan nasional, data pembanding belum tersedia. Namun demikian, capaian kinerja Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan

arsip melalui penerapan standar pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Pengelolaan Arsip dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	41.328.200	41.080.641	99.40
Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	6000 Berkas	6000 Berkas	100.00

b. Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	18.474.500	17.673.500	95,66
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	100,00

Sasaran 4:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan 1 (satu)

indikator kinerja sasaran Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 91,21% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.4
Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Realisasi tahun sebelumnya, nilai evaluasi reformasi birokrasi menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2023 nilai yang diperoleh adalah 74,17 dengan predikat BB, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 85,26 dengan predikat A. Sementara pada tahun 2025 nilai yang diperoleh sebesar 78,44 dengan predikat BB. Perubahan nilai tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam hasil evaluasi reformasi birokrasi, meskipun secara umum masih berada pada kategori yang baik.

Capaian kinerja di Tahun 2025 mengalami penurunan, ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya pemenuhan eviden dukung pada sejumlah indikator Reformasi Birokrasi Parsial, seperti Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Evaluasi Pelayanan Publik, Indeks

Kualitas Kebijakan Publik, dan Tingkat Kematangan SPBE, dimana sebagian indikator belum didukung dokumentasi yang lengkap dan sistematis sesuai kriteria evaluasi Kementerian PANRB. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Reformasi Birokrasi belum dilakukan secara berkala dan terstruktur. Ke depan, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan sistem dokumentasi, pelaporan, dan pengendalian internal agar capaian Reformasi Birokrasi dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2023 capaian indikator tercatat sebesar 114,11%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 114,95%. Sementara pada tahun 2025 capaian kinerja berada pada 91,21% dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, yaitu nilai 67 dengan predikat B, maka realisasi tahun 2025 sebesar 78,44 dengan predikat BB telah melampaui target Renstra dengan tingkat capaian sebesar 117,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah telah mampu mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah direncanakan.

Dari sisi dukungan anggaran, pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp61.548.019.672, dengan realisasi anggaran sebesar Rp55.338.847.795 atau 89,91% dari total pagu yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup optimal.

Berdasarkan perbandingan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, data pembanding belum tersedia. Namun demikian, capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada pada predikat BB menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.326.670	17.3820.240	99,14
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00

b. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.950.100	37.537.500	93,96
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	29.459.330.493	27.107.709.845	92,02
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2422 Orang/bulan	2422 Orang/bulan	100,00

b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.925.000	70.053.000	98,77
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	100,00

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	49.946.525	99,89
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105.178.500	101.232.212	96,25
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	256.940.118	256.583.100	99,86
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.171.598.219	1.138.449.571	97,17
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	447.670.000	445.083.500	99,42
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

d. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	199.452.000	196.315.090	98,43
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

e. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	556.636.800	550.929.563	98,97
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

f. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.000.000	114.888.000	99,90
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
	Perundang-Undangan yang Disediakan			

g. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.539.327	472.135.880	99,91
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000	265.100.000	94,68
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00

b. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.537.153	635.969.319	93,73
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100,00

c. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.535.404.665	1.413.289.201	92,05
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	204 Unit	204 Unit	100,00

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.421.322.451	1.366.772.634	96,16

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.387.156.707	2.927.584.191	86,43
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	522.000.000	504.320.660	96,61
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	100,00

- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.139.139.003	1.790.777.054	83,71
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	137 Unit	137 Unit	100,00

- c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.411.318.747	1.405.035.491	99,55
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00

- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	590.200.000	566.454.700	95,98
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	318 Unit	318 Unit	100,00

9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.496.399.829	892.920.811	35,77
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	100,00

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120.000.000	112.409.998	93,67
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	6 Paket	6 Paket	100,00

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
	Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			

c. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	967.000.000	561.697.000	58,09
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	100,00

d. Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000	600,000,000	100,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100,00

10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.204.000.000	1.154.895.401	95,92
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	905.000.000	885.347.634	97,83
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.819.141.780	4.799.672.000	99,60
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100,00

11. Penataan Organisasi

a. Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	97.451.600	90.913.808	93,29
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	100,00

b. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.036.000	35.856.000	94,72
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	100,00

c. Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	96.346.800	91.031.056	94,48
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

d. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	41.560.400	41.425.000	99,67

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
	Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

e. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30.880.000	25.505.000	82,59
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.816.019.300	1.664.946.391	91,68
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

b. Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.449.300.610	2.035.144.847	83,09
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

c. Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	781.257.400	757.095.573	96,91
Keluaran	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

Sasaran 5:

Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, yaitu:

- A. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang Ditindaklanjuti memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.5
Kinerja Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang Ditindaklanjuti

Tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan yang disusun telah ditindaklanjuti secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi indikator tercatat sebesar 100%, dan pada tahun 2024 juga mencapai 100%, sehingga tidak terdapat perubahan atau peningkatan nilai realisasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut telah stabil dan konsisten berada pada tingkat maksimal.

Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing juga tercatat sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 tetap berada pada 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang

mendukung tindak lanjut bahan kebijakan umum telah berjalan secara efektif dan konsisten setiap tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, yaitu sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, penyusunan, serta tindak lanjut terhadap bahan kebijakan umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan strategis perangkat daerah.

Dari sisi dukungan anggaran, pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp.910.406.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.881.472.947 atau 96,82% dari total pagu yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 3,18%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan perbandingan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, data pembanding belum tersedia. Namun demikian, capaian Kabupaten Tasikmalaya sebesar 100% menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap bahan kebijakan umum lingkup pemerintahan telah dilaksanakan secara optimal dalam rangka mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Tata Pemerintahan

a. Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	174.543.300	162.019.307	92,82
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

b. Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	181.334.600	172.461.476	95,11
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

c. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	436.978.100	429.492.244	98,29
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00

2. Fasilitasi Kerjasama Daerah

a. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	117.550.000	117.499.920	99,96

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	100,00

B. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.6
Kinerja Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah

Tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah telah dapat dilaksanakan secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi yang

sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi indikator tercatat sebesar 100%, kemudian pada tahun 2024 juga mencapai 100%, dan pada tahun 2025 tetap berada pada 100%. Dengan demikian tidak terdapat peningkatan maupun penurunan, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator ini stabil dan konsisten berada pada tingkat maksimal.

Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing juga tercatat sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 tetap berada pada 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan setiap tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, yaitu sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dari sisi dukungan anggaran, pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp.19.080.281.311, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.064.491.080 atau 89,44% dari total pagu yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,56%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbandingan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, data pembandingan belum tersedia. Namun demikian, capaian Kabupaten Tasikmalaya sebesar 100%

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan secara optimal dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.917.339.311	16.925.675.080	89,47
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00

b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	81.092.000	72.381.000	89,26
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
	dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			

c. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	81.850.000	66.435.000	81,17
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00

C. Persentase Regulasi Peraturan Pusat yang Ditindaklanjuti Menjadi Peraturan Perundang-Undangan Daerah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.7
Kinerja Persentase Regulasi Peraturan Pusat yang Ditindaklanjuti Menjadi Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah ditindaklanjuti secara optimal menjadi peraturan perundang-undangan daerah.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi indikator tercatat sebesar 100%, kemudian pada tahun 2024 juga mencapai 100%, dan pada tahun 2025 tetap berada pada 100%. Dengan demikian tidak terdapat perubahan nilai realisasi pada periode 2023–2025, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator ini stabil dan konsisten berada pada tingkat maksimal.

Dari sisi capaian kinerja, pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing-masing tercatat sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 tetap berada pada 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa proses harmonisasi, penyusunan, serta penetapan regulasi daerah yang merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat telah dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, yaitu sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan daerah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dari sisi dukungan anggaran, pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp548.616.050, dengan realisasi anggaran sebesar Rp530.505.270 atau 96,70% dari total pagu yang tersedia. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,30%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perbandingan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, data pembanding belum tersedia. Namun demikian, capaian Kabupaten Tasikmalaya sebesar 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menindaklanjuti regulasi dari pemerintah pusat secara optimal melalui pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	156.218.750	152.305.370	97,49
Keluaran	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	370 Dokumen	528 Dokumen	142,70

b. Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Hukum

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	205.000.000	196.064.000	95,64
Keluaran	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	29 Kasus	29 Kasus	100,00

c. Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

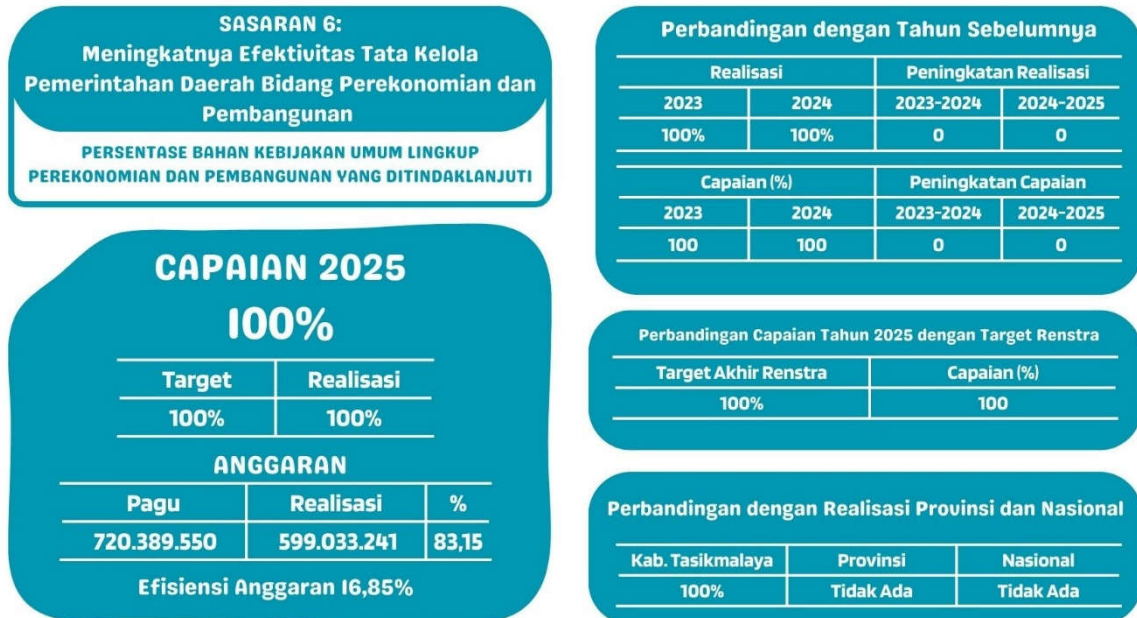
Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	187.397.300	182.135.900	97,19
Keluaran	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	370 Dokumen	278 Dokumen	75,13

Sasaran 6:

Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu:

- A. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.8
Kinerja Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi indikator tercatat sebesar 100%, kemudian pada tahun 2024 juga mencapai 100%, dan pada tahun 2025 tetap berada pada 100%. Dengan demikian tidak terdapat perubahan nilai realisasi pada periode 2023–2025, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator ini stabil dan konsisten berada pada tingkat maksimal.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi, di mana pada tahun 2023 dan 2024 juga tercatat sebesar 100%. Dengan demikian, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian pada periode tersebut, namun menunjukkan stabilitas kinerja dalam memastikan seluruh bahan kebijakan yang disusun dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target sebesar 100%, sehingga indikator ini dinilai telah mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2025 dialokasikan pagu sebesar Rp.720.389.550, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.599.033.241 atau 83,15% dari pagu yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 16,85%, tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah mencapai target maksimal.

Berdasarkan perbandingan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional, data pembanding belum tersedia. Namun demikian, capaian Kabupaten Tasikmalaya sebesar 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menindaklanjuti regulasi dari pemerintah pusat secara optimal melalui pembentukan peraturan perundang-undangan daerah.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	92.500.000	86.027.000	93,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00

b. Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	229.832.000	180.266.041	78,43
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100,00

c. Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	41.281.000	25.127.900	60,87
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00

d. Sub Kegiatan : Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan BUMD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan BUMD	150.685.000	150.482.200	99,87
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

a. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	90.786.800	77.664.000	85,55
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

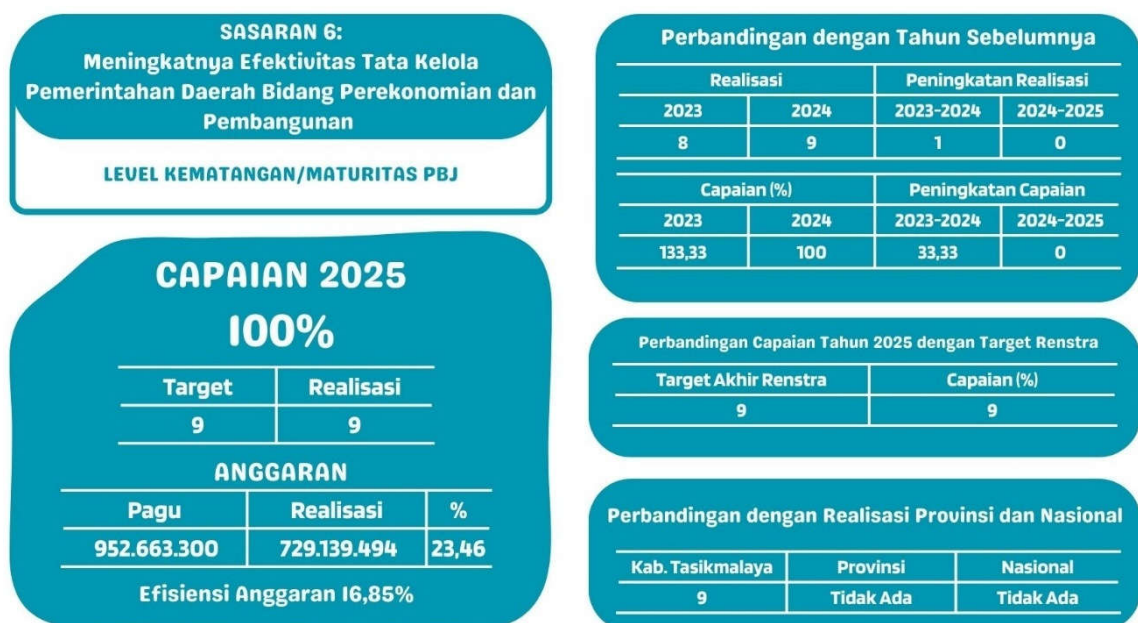
b. Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36.592.400	30.121.900	82,32
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	100,00

c. Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	78.712.350	49.344.200	62,69
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

B. Level Kematangan/Maturitas PBJ memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.



Gambar 3.9
Kinerja Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2025, indikator kinerja Level Kematangan (Maturitas) PBJ menunjukkan capaian yang optimal. Target yang ditetapkan sebesar level 9 berhasil direalisasikan sebesar level 9,

sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, indikator ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun 2023 sebesar level 8 menjadi level 9 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 capaian tersebut tetap dipertahankan pada level 9, yang menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan perangkat daerah.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar level 9. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan strategis daerah.

Dari sisi dukungan anggaran, pada tahun 2025 dialokasikan pagu sebesar Rp.952.663.300, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.729.139.494 atau 76,54% dari pagu yang tersedia. Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar 23,46% dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	753.180.000	533.795.735	70,87
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200 Dokumen	200 Dokumen	100,00

- b. Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	96.133.800	92.089.500	95,79
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150 Dokumen	150 Dokumen	100,00

- c. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103.349.500	103.254.259	99,91
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	50 Orang	100,00

3.1.3 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Dalam pencapaian target kinerja pada Sekretariat Daerah terbagi 2 kategori yaitu, yang mencapai target dengan capaian 100% sebanyak 7 indikator kinerja, yang terdiri dari:

1. Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan dengan capaian kinerja 100%;
2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku dengan capaian kinerja 100%;

3. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100%;
4. Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan capaian kinerja 100%;
5. Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah dengan capaian kinerja 100%;
6. Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100%;
7. Level Kematangan/Maturitas PBJ dengan capaian kinerja 100%.

Keberhasilan ini didukung oleh adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah, kejelasan regulasi, serta komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat juga 2 indikator yang tidak mencapai target kinerja (<100%), terdiri dari:

1. Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan capaian kinerja N/A;
2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah dengan capaian 91,21%.

Masih terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai target. Belum tercapainya indikator tingkat kegemaran membaca masyarakat dikarenakan Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki Dinas Perpustakaan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan, sehingga tidak termasuk dalam objek pengukuran TKM Tahun 2025. Sementara itu, capaian

nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh belum optimalnya pemenuhan eviden dukung pada beberapa indikator penilaian serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal yang belum dilakukan secara berkala dan terstruktur.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut Sekretariat Daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan guna meningkatkan optimalisasi pembinaan, serta menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi kelangsungan pelayanan perpustakaan, dan juga meningkatkan partisipasi lintas sektor maupun partisipasi eksternal guna mengoptimalkan fungsi perpustakaan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan gambaran kebijakan dan rencana kerja yang berhubungan dengan kemampuan keuangan pemerintah untuk memberikan stimulus dalam mempercepat tujuan pembangunan yang ingin dicapai serta dialokasikan berdasarkan satuan uang dalam setiap bidang pembangunan. Dengan demikian kebijakan dalam penetapan anggaran dapat dijadikan instrumen perencanaan yang lebih efektif dan komprehensif. Sebenarnya ada dua hal yang paling utama yang dijadikan alasan bahwa anggaran lebih efektif dan komprehensif tersebut, yaitu : **Pertama**, untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya ekonomi telah dialokasikan pada program-program yang diprioritaskan. **Kedua** untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya, tapi bukan berarti semua pengeluaran harus dikelola berdasarkan prosedur yang sama. Dengan pertimbangan efisiensi maka rancangan khusus untuk proses administrasi pada beberapa program mungkin akan dibuat, yang merupakan suatu pendekatan terpisah pada formulasi kebijakan pengeluaran dan anggaran.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	SEKRETARIAT DAERAH	85.997.502.983	77.098.022.114	89,65%	100,00%
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.946.734.900	1.668.796.146	85,72%	100,00%
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.946.734.900	1.668.796.146	85,72%	100,00%
	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.946.734.900	1.668.796.146	85,72%	100,00%
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	230.589.500	226.982.000	98,44%	100,00%
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.589.500	226.982.000	98,44%	100,00%
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	230.589.500	226.982.000	98,44%	100,00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	59.802.700	58.754.141	98,25%	100,00%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	59.802.700	58.754.141	98,25%	100,00%
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	41.328.200	41.080.641	99,40%	100,00%
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	18.474.500	17.673.500	95,66%	100,00%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.548.019.672	55.338.847.795	89,91%	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.276.770	211.357.740	98,18%	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.326.670	173.820.240	99,14%	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.950.100	37.537.500	93,96%	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.530.255.493	27.177.762.845	92,03%	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.459.330.493	27.107.709.845	92,02%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.925.000	70.053.000	98,77%	100,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	49.946.525	99,89%	100,00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	49.946.525	99,89%	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.178.500	101.232.212	96,25%	100,00%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105.178.500	101.232.212	96,25%	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.219.836.464	3.174.384.704	98,59%	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	256.940.118	256.583.100	99,86%	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.171.598.219	1.138.449.571	97,17%	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	447.670.000	445.083.500	99,42%	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.452.000	196.315.090	98,43%	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	556.636.800	550.929.563	98,97%	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.000.000	114.888.000	99,90%	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.539.327	472.135.880	99,91%	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.493.941.818	2.314.358.520	92,80%	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000	265.100.000	94,68%	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.537.153	635.969.319	93,73%	100,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.535.404.665	1.413.289.201	92,05%	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.808.479.158	4.294.356.825	89,31%	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.421.322.451	1.366.772.634	96,16%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.387.156.707	2.927.584.191	86,43%	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.662.657.750	4.266.587.905	91,51%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	522.000.000	504.320.660	96,61%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.139.139.003	1.790.777.054	83,71%	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.411.318.747	1.405.035.491	99,55%	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	590.200.000	566.454.700	95,98%	100,00%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.183.399.829	2.167.027.809	51,80%	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.496.399.829	892.920.811	35,77%	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120.000.000	112.409.998	93,67%	100,00%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	967.000.000	561.697.000	58,09%	100,00%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	100,00%	100,00%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.928.141.780	6.839.915.035	98,73%	100,00%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.204.000.000	1.154.895.401	95,92%	100,00%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	905.000.000	885.347.634	97,83%	100,00%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.819.141.780	4.799.672.000	99,60%	100,00%
	Penataan Organisasi	304.274.800	284.730.864	93,58%	100,00%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	97.451.600	90.913.808	93,29%	100,00%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.036.000	35.856.000	94,27%	100,00%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	96.346.800	91.031.056	94,48%	100,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.560.400	41.425.000	99,67%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30.880.000	25.505.000	82,59%	100,00%
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.046.577.310	4.457.186.811	88,32%	100,00%
	Fasilitasi Keprotokolan	1.816.019.300	1.664.946.391	91,68%	100,00%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.449.300.610	2.035.144.847	83,09%	100,00%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	781.257.400	757.095.573	96,91%	100,00%
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.539.303.361	18.476.469.297	89,96%	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Administrasi Tata Pemerintahan	792.856.000	763.973.027	96,36%	100,00%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	174.543.300	162.019.307	92,82%	100,00%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	181.334.600	172.461.476	95,11%	100,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	436.978.100	429.492.244	98,29%	100,00%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.080.281.311	17.064.491.080	89,44%	100,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18.917.339.311	16.925.675.080	89,47%	100,00%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	81.092.000	72.381.000	89,26%	100,00%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	81.850.000	66.435.000	81,17%	100,00%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	548.616.050	530.505.270	96,70%	100,00%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	156.218.750	152.305.370	97,49%	100,00%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	205.000.000	196.064.000	95,64%	100,00%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	187.397.300	182.135.900	97,19%	100,00%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	117.550.000	117.499.920	99,96%	100,00%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	117.550.000	117.499.920	99,96%	100,00%
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.673.052.850	1.328.172.735	79,39%	100,00%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	514.298.000	441.903.141	85,92%	100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	92.500.000	86.027.000	93,00%	100,00%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	229.832.000	180.266.041	78,43%	100,00%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	41.281.000	25.127.900	60,87%	100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	150.685.000	150.482.200	99,87%	100,00%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	206.091.550	157.130.100	76,24%	100,00%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	90.786.800	77.664.000	85,55%	100,00%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36.592.400	30.121.900	82,32%	100,00%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	78.712.350	49.344.200	62,69%	100,00%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	952.663.300	729.139.494	76,54%	100,00%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	753.180.000	533.795.735	70,87%	100,00%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	96.133.800	92.089.500	95,79%	100,00%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	103.349.500	103.254.259	99,91%	100,00%

Realisasi pendapatan sebesar Rp. 117.305.760.- atau 100,0034% dari target pendapatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 117.301.760,-. Pendapatan tersebut tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp. 77.098.022.114,- atau 89,65% dari anggaran sebesar Rp. 85.997.502.983,-.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi selama Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati. laporan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan laporan akuntabilitas yang didasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Periode 2021-2026.

**Tabel 4.1 Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Rata-rata Capaian
Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	2	2	100%
2	Meningkatnya Minat Budaya	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,20	57,29	79,35%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
	Baca Masyarakat				
3	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	50,85 (30/59)	50,85 (30/59)	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	A (86)	BB (78,44)	91,21%
5	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100	100	100%
		Persentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan pemerintah daerah	100	100	100%
		Persentase regulasi peraturan pusat yang ditindaklanjuti menjadi peraturan perundang-undangan daerah	100	100	100%
6	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100%
		Level Kematangan/Maturitas PBJ	9	9	100%

Rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 adalah 96,73% dimana terdapat 7 indikator mencapai target dan 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target.

Berdasarkan Rencana Strategis terdapat 6 sasaran dengan 9 indikator yang diperjanjikan dengan didukung oleh 6 program, 22 kegiatan 61 subkegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 85.997.502.983,- realisasi Rp. 77.098.022.114,- (89,65%). Dengan capaian output kegiatan rata-rata mencapai 100%.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, pembinaan aparatur serta pelaksanaan program dan kegiatan tahunan merupakan bagian integral dari fungsi manajemen yang harus dijalankan secara profesional, terarah, dan berkualitas. Optimalisasi pelaksanaan program sesuai dengan kewenangan masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya sasaran kinerja organisasi.

Kedua, penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi yang harmonis dan terintegrasi akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh kategori “A” (Sangat Baik). Capaian tersebut menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas

kinerja. Dalam penyusunan LKIP Tahun 2025, telah dilakukan berbagai langkah penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan. Diharapkan pada penilaian tahun 2025, capaian kinerja dan kualitas akuntabilitas dapat semakin meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi yang objektif serta referensi dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Semoga berbagai upaya yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Februari 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN I

TABEL 6.1 RENCANA STRATEGIS SETDA KAB. TASIKMALAYA

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. MOHAMAD ZEN

Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. YEDI RAHMAT, S.E.

Jabatan : Pjs. Bupati Tasikmalaya

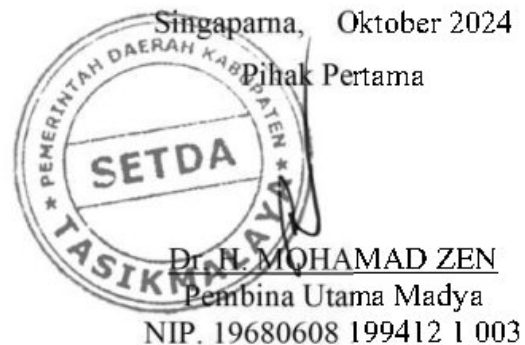
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua



Singaparna, Oktober 2024

Pihak Pertama

Dr. H. MOHAMAD ZEN
Pembina Utama Madya

NIP. 19680608 199412 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pembebasan Tanah	1	Jumlah Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang terselesaikan	4
2	Meningkatnya Minat Budaya Baca Masyarakat	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64,85
3	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan Arsip Secara Baku	20,33% (12/59)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (74,17)
5	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	100%
		2	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Sosial Dan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah	100%
		3	Persentase Regulasi Peraturan Pusat Yang Ditindaklanjuti Menjadi Peraturan Perundang-undangan Daerah	100%
6	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
		2	Level Kematangan/Maturitas PBJ	9

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp. 6.477.000.000	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp. 300.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp. 80.000.000	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 67.632.919.633	
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 63.731.482.500	
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.266.440.000	
	JUMLAH	Rp. 140.487.842.133	

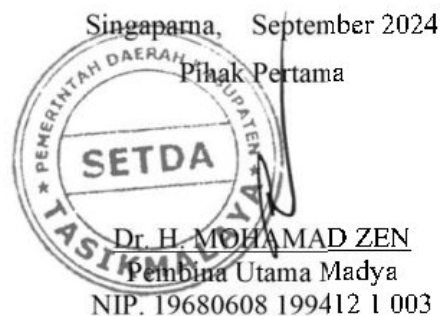
Pihak Kedua



H. AEDIRAHMAT, S.E.

Singaparna, September 2024

Pihak Pertama



Dr. H. MOHAMAD ZEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19680608 199412 1 003

LAMPIRAN III
RENCANA AKSI TAHUN 2025